

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan yang bermutu (Hartayu et al., 2020; Meliana Waty Parera et al., 2021; Parera et al., 2021). Kehadiran apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin ketersediaan obat, pelayanan informasi obat, dan konseling pasien. Untuk memastikan kualitas pelayanan kefarmasian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Regulasi ini mewajibkan setiap apotek untuk menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam upaya melindungi masyarakat dan memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional (Indriani et al., 2024).

Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kualitas Pelayanan di Apotek memerlukan strategi yang efektif melalui penggunaan instrumen evaluasi yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan penerapan standar pelayanan kefarmasian (Cahyani et al., 2023; LUMBA et al., 2021; Wati et al., 2013). Penggunaan instrumen evaluasi yang terstandardisasi dan berbasis teknologi dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan kepatuhan tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip teoritis dan praktik yang telah diteliti oleh beberapa peneliti.

Menurut Dewi dan Dewi, keputusan implementasi dan evaluasi strategi dalam konteks pemerintahan dapat dipengaruhi oleh isomorfisme institusional, yang menunjukkan perlunya penyesuaian dalam penerapan sistem untuk mencapai kepatuhan (Dewi, 2022). Selain itu, peningkatan kepatuhan pelaporan dalam berbagai sektor, termasuk pajak dan pelayanan kesehatan, telah menunjukkan hubungan positif antara penggunaan sistem yang efisien dan kualitas laporan yang dihasilkan (Achmad, 2022; Felani, 2022). Penelitian-penelitian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi dan sistem yang tepat untuk meningkatkan hasil evaluasi.

Mengacu pada studi yang dilakukan oleh Judijanto et al., kualitas audit, independensi auditor, dan transparansi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan (Gusthawan, 2017; Judijanto, 2024; Walsono, 2016). Hal ini bisa diterjemahkan dalam konteks aplikasi SIMONA, di mana transparansi dalam pelaporan pelayanan kefarmasian juga menjadi krusial. Penelitian tentang instrumen evaluasi berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) juga membuktikan bahwa evaluasi yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan umpan balik yang lebih konstruktif dan memperbaiki proses belajar (Barokah et al., 2021). Penerapan prinsip-prinsip HOTS pada instrumen evaluasi untuk pelaporan di apotek dapat mendorong pengembangan keterampilan analitis dan penyelesaian masalah di kalangan staf apotek.

Kajian tentang kepatuhan pelaporan yang diperoleh dari sistem perpajakan menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan dan sanksi di antara pelapor sangat berpengaruh pada tingginya tingkat kepatuhan mereka (Barokah, 2021; Latuamury, 2021). Ini memperkuat argumen bahwa dalam implementasi SIMONA, pendidikan dan pelatihan mengenai kepatuhan dalam pelaporan data kefarmasian harus menjadi fokus utama, sehingga apoteker dan staf terkait dapat memahami pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam melaporkan data.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang terus berkembang di bidang pelayanan kesehatan. Dalam lingkup pelayanan kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bidang Kefarmasian bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah apotek yang terdaftar di wilayah ini mencapai ± 100 apotek yang tersebar di beberapa kecamatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pelayanan kefarmasian di apotek memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam pemberian informasi obat dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan standar pelayanan kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerapkan aplikasi berbasis digital yang disebut SIMONA (Sistem

Informasi Monitoring dan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian). SIMONA merupakan sistem pelaporan daring yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktivitas pelayanan kefarmasian di apotek secara berkala. Melalui aplikasi ini, apoteker diwajibkan untuk melaporkan kegiatan pelayanan informasi obat, konseling pasien, serta pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pelaporan sekaligus mendukung pengawasan yang lebih efektif oleh Dinas Kesehatan.

Namun, dalam implementasinya, tingkat kepatuhan apoteker dalam melakukan pelaporan melalui SIMONA masih rendah. Berdasarkan data internal Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, hanya sekitar 50% apotek yang secara rutin melaporkan pelayanan kefarmasian melalui aplikasi ini. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Dinas Kesehatan dalam memastikan penerapan standar pelayanan kefarmasian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman apoteker terkait mekanisme penggunaan SIMONA, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Selain itu, tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi berkala juga menjadi kendala dalam mendorong apoteker untuk secara aktif melakukan pelaporan.

Permasalahan ini menjadi krusial karena pelaporan pelayanan kefarmasian melalui SIMONA berfungsi sebagai instrumen pengawasan dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila kepatuhan dalam pelaporan tidak ditingkatkan, maka efektivitas pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan kefarmasian akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima oleh Masyarakat (Katharina, 2021; Khozin, 2010). Sebagai pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertugas di Bidang Kefarmasian, penulis memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengawasi pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan tugas pembinaan, penulis menyadari pentingnya strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan melalui SIMONA. Oleh karena itu, penulis merancang sebuah instrumen evaluasi sebagai salah satu Strategi Implementasi SIMONA untuk Mewujudkan

Kepatuhan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Kotawaringin Barat".

Upaya ini menjadi penting karena sejalan dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Topik ini dipilih sebagai bentuk kontribusi nyata penulis dalam mendukung transformasi digital di bidang pelayanan kefarmasian, sekaligus sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas apotek dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian.

Urgensi tema ini terletak pada pentingnya membangun sistem pelaporan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam pelayanan kefarmasian. Dengan adanya strategi implementasi yang tepat melalui instrumen evaluasi, diharapkan SIMONA mampu menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kepatuhan apoteker, mendukung pengawasan yang lebih efektif, dan pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

a. Ruang Lingkup Pengabdian

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam kajian ini berfokus pada upaya peningkatan kepatuhan pelaporan penerapan standar pelayanan kefarmasian melalui aplikasi SIMONA (Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang Kefarmasian, penulis memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelayanan kefarmasian di apotek. Lingkup pengabdian ini berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap apotek menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pembinaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kewajiban untuk memberikan

edukasi, sosialisasi, serta pemantauan terhadap praktik pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apotek di wilayah tersebut. Lingkup pengabdian yang dilakukan mencakup:

- 1) Sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian: Memberikan pemahaman kepada apoteker tentang pentingnya penerapan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Sosialisasi ini meliputi aspek pelayanan informasi obat, konseling pasien, pengelolaan obat, hingga pencatatan dan pelaporan pelayanan kefarmasian.
- 2) Pemberian Bimbingan Teknis: Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada apoteker terkait penggunaan aplikasi SIMONA, mulai dari tata cara input data, pengelolaan laporan, hingga mekanisme pengiriman laporan secara daring.
- 3) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek melalui laporan yang diunggah pada aplikasi SIMONA. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa apoteker melaporkan kegiatan pelayanan kefarmasian secara rutin dan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Penegakan Kepatuhan: Memberikan teguran, rekomendasi, hingga sanksi administratif kepada apotek yang tidak patuh dalam melaporkan pelayanan kefarmasian melalui SIMONA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Ruang Lingkup Pengembangan

Lingkup pengembangan dalam kajian ini berfokus pada upaya inovasi dalam strategi implementasi SIMONA yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan di kalangan apoteker. Inovasi yang dikembangkan meliputi:

- 1) Evaluasi Berbasis Digital: Penyusunan instrumen evaluasi berbasis digital yang memungkinkan Dinas Kesehatan

melakukan penilaian langsung terhadap kualitas laporan yang diunggah melalui SIMONA.

1. Tujuan Tugas Akhir Program RPL

Penulisan Tugas Akhir Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini memiliki tujuan sebagai landasan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang selaras dengan tugas dan tanggung jawab penulis sebagai pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya pada bidang Kefarmasian.

a. Tujuan Umum

Menyusun strategi implementasi aplikasi SIMONA (Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian) sebagai instrumen pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian yang berbasis digital, sehingga pelayanan kefarmasian menjadi lebih transparan, terstandar, dan akuntabel. Strategi yang disusun juga bertujuan untuk mendukung program transformasi digital di sektor kesehatan, khususnya dalam mewujudkan pengawasan berbasis teknologi yang mampu mempermudah pemantauan dan evaluasi pelayanan kefarmasian di tingkat daerah.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Strategi Implementasi SIMONA melalui Instrumen Evaluasi untuk Mewujudkan Kepatuhan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Evaluasi Berbasis Digital

1. Manfaat Tugas Akhir Program RPL

a. Manfaat Bagi Universitas

Tugas Akhir ini memberikan kontribusi dalam bentuk referensi ilmiah yang mendukung pengembangan keilmuan di bidang pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital. Penelitian ini memperkaya literatur akademik terkait strategi implementasi teknologi informasi dalam pelayanan kefarmasian, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan di apotek. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung upaya universitas dalam memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam aspek penelitian dan pengabdian masyarakat, karena mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan pelayanan kesehatan di daerah. Penelitian ini juga menjadi model penerapan keilmuan yang dapat diadopsi oleh universitas lain dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan.

b. Manfaat Bagi Tempat Kerja

Bagi tempat bekerja, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Tugas Akhir ini memberikan manfaat berupa rekomendasi strategi implementasi aplikasi SIMONA yang lebih efektif dan inovatif dalam meningkatkan kepatuhan apoteker dalam pelaporan pelayanan kefarmasian. Strategi yang disusun dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan pembinaan pelayanan kefarmasian yang berbasis teknologi. Penerapan strategi ini juga diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pelayanan kefarmasian secara transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence-based). Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu Dinas Kesehatan dalam menyusun program pengembangan kapasitas apoteker melalui bimbingan teknis dan pelatihan digital, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di seluruh apotek yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.